

## KEHIDUPAN DEMOKRASI INDONESIA DAN MASALAH GENDER (PERSPEKTIF SOSIO-HISTORIS)

M H. Sri Rahayu\*

### **Abstrak**

*Stratifikasi sosial menyebabkan terjadinya tingkatan-tingkatan atau kelas-kelas dalam masyarakat di semua belahan bumi ini. Pengaruh jaman pencerahan (Aufklarung) hingga jaman reformasi membawa perubahan yang signifikan dalam perjalanan sejarah umat manusia. Sehingga munculah teori-teori sosial atau teori kelas yang dicetuskan oleh Karl Marx yang dapat membantu analisis sosial untuk memahami ketidakadilan dalam masalah gender. Perkembangan kehidupan demokrasi merupakan salah satu sarana guna memecahkan masalah gender, karena demokrasi memberikan peluang terhadap kesetaraan kehidupan manusia antara pria dan wanita tanpa ada perbedaan status, sehingga terjadilah apa yang dikenal dengan istilah kesejajaran atau mitra sejajar.*

**Kata kunci : Demokrasi, Equality, Gender, Mitra sejajar**

### **Pendahuluan**

Peran wanita Indonesia semakin hari semakin pasti, seperti dalam pidato ilmiah Prof.Dr. Darsiti Soeratman dalam rangka pembukaan Pasca Sarjana semester I tahun akademik 1991/1992 di Universitas Gajah Mada diberi judul : Wanita Indonesia : Lampau, Kini dan Mendatang. Dalam pidato tersebut dikutip pendapat Futurolog Amerika Serikat Naisebitt dan istrinya, Arbudene dalam bukunya Megatrend 2000, bahwa pada dasawarsa 1990-an ada sepuluh kecenderungan. Satu diantaranya tentang bakal tampilnya kaum wanita di atas pentas kepemimpinan (Program Pasca sarjana UGM 1991, p.13). Menjelang akhir abad 20 Pustaka Sinar Harapan juga menerbitkan buku berjudul : Perempuan Indonesia Pemimpin Masa Depan?, yang disunting oleh Mely G.Tan. Ada beberapa

tokoh wanita menyumbangkan pikirannya dalam buku ini salah satunya yakni Toeti Heraty Noerhadi, yang menyoroti permasalahan prospek kepemimpinan wanita tidak begitu cerah, karena budaya masyarakat yang masih dipengaruhi oleh kehidupan feodal dan penjajahan. Oleh sebab itu perlu ada terobosan tentang kepemimpinan, yang berarti pengembangan sifat androgini, baik pria maupun wanita (Tan, 1991, p.27).

Negara Indonesia adalah Negara yang mengalami penjajahan Barat (Belanda) cukup lama di samping pemerintahan feodal yang budayanya boleh jadi merugikan kaum wanita karena ketertinggalan dalam pendidikan?. Berkaitan dengan masalah ini, sebenarnya juga pernah dialami oleh negara-negara yang masih terbelakang (*underdevelopment*), maupun negara yang sedang berkembang atau bahkan negara

\* **M H. Sri Rahayu** adalah Dosen Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo

maju sekalipun pernah mengalami hal yang sama. Perubahan zaman dan perkembangan teknologi yang dikobarkan abad pencerahan mungkin sebagai pertanda adanya pergeseran kearah kemajuan, yang meliputi segala aspek kehidupan manusia.

Pengantar ini untuk memberikan arah terhadap pembahasan tentang kehidupan demokrasi Indonesia dan masalah gender sebagai bahan kajian yang menarik. Sebagai pengantar, uraian ini berusaha menghindari analisis yang terlalu teoritis serta mengusahakan implikasi pemahaman teoritis terhadap persoalan-persoalan yang lebih praktis disamping tidak mengupas segala macam analisis sosial dari perspektif gender.

### **Pancasila Sebagai Landasan Demokrasi**

Secara umum dapat dikatakan demokrasi adalah sistem politik yang memungkinkan semua warga negara atau bangsa mempunyai kesempatan mewujudkan aspirasinya. Dalam sejarah umat manusia tampak bahwa demokrasi berkembang sesuai dengan kondisi bangsa yang bersangkutan dan didalamnya ada nilai budaya, pandangan hidup serta adat istiadat (Muhadi,2003,p.20). Jadi tiap-tiap bangsa memiliki cara sendiri dalam mewujudkan demokrasi. Sebagai contoh adalah bangsa Eropa Barat yang punya kesamaan budaya, pandangan hidup dan adat istiadat, namun demokrasi yang berkembang di Perancis dan Inggris tidak

sepenuhnya sama. Demikian halnya dengan bangsa Amerika dan Inggris yang sama sama digolongkan bangsa Anglosaxon, terdapat perbedaan besar dalam pelaksanaan demokrasi. Jadi tidak ada pelaksanaan demokrasi yang bersifat universal atau berlaku bagi semua bangsa.

Pelaksanaan demokrasi tiap bangsa dapat terjadi perubahan sesuai dengan perkembangannya termasuk dalam hak pilih untuk kaum perempuan. Demokrasi Barat memberikan kekuasaan pada yang kuat dan yang kaya atau dapat dikatakan liberal individualistis (Hazairin,1973,p.22). Sebenarnya demokrasi bukan hal yang baru bagi bangsa dan masyarakat Indonesia apalagi dipertegas dalam Pancasila bahwa demokrasi sebagai Isi Jiwa Bangsa. Sebagai perwujudan demokrasi bagi bangsa Indonesia tidak harus sama dengan yang dilakukan bangsa lain termasuk bangsa Barat, karena memang berbeda pandangan hidupnya.

Dengan menginsafi terjadinya kerancuan perilaku dan akhlak akibat masuknya unsur-unsur kebudayaan Barat yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia, maka demokrasi Indonesia ditingkatkan dengan unsur-unsur dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga melingkupi semua kehidupan negara dan bangsa (Hazairin,1973,p.23). Dari sila Ketuhanan Yang Maha Esa didalamnya terkandung unsur keadilan sosial dan mengandung arti luas bukan saja tenggang menenggang

perasaan dan kepentingan dalam pergaulan hidup antar manusia dan antar bangsa. Demokrasi sebagai kata dan lembaga asing berasal dari lingkungan kebudayaan Eropa yang mengenal sistem Feodalisme sehingga melahirkan pembagian manusia dalam golongan golongan bertingkat yakni: Golongan Bangsawan, golongan Pendeta, golongan Hartawan, dan golongan Pekerja serta Petani. Dalam Demokrasi Barat pada dasarnya adalah merupakan perjuangan panjang kaum tertindas menentang kaum elit. Selain itu keterlibatan kaum Nasrani yang didalamnya terdapat kaum Bolsyewik yang kemudian malahan menjadi kaum atheis (Hazairin,1973,p.26).

Perkembangan zaman pencerahan juga memunculkan perubahan alam pikiran manusia dan mengarah pada ratio sebagai kebenaran, ditandai adanya semangat kemajuan. Namun demikian alam pikiran kaum Bolsyewik menjadi atheis merupakan suatu pertanyaan besar mengingat kaum ini semula sebagi pengikut Nasrani. Nampak jelas bahwa pencerahan diterima secara rational karena timbulnya semangat ilmiah dan membawa kemajuan guna membuka alam kebenaran duniawi (Muhadi,2003,p.21), sehingga kaum Bolsyewik berubah menjadi kaum atheis. Berkaitan dengan hal tersebut menunjukkan bahwa demokrasi Barat menjadi sekuler dalam arti bahwa tidak factor Ketuhanan Yang Maha Esa

mempengaruhinya disamping factor individu yang otonom.

Berbeda sekali dengan demokrasi Indonesi yang tidak dapat lepas dari factor Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai sila pertama Pancasila. Kendatipun Indonesia bukan Negara berdasarkan agama, namun ia bukan pula negara sekuler yang menolak factor agama dalam kehidupan bernegara, jadi demokrasi Indonesia tidak pernah dan tidak boleh lepas dari faktor moral yang diwariskan oleh kehidupan budaya nenek moyang bangsa. Pelu diingat bahwa Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia oleh Bung Karno, itu berarti nenek moyang bangsa Indonesia mewariskan nilai nilai moral kepada seluruh anak bangsa Indonesia yang tercermin dari ajaran Pancasila (Notonegoro,1984,p.41). Selanjutnya Notonegoro menekankan tentang pentingnya ajaran nilai dan moral secara berkesinambungan diwariskan terus menerus dari generasi ke generasi seperti yang dipantulkan oleh nilai nilai Pancasila (Notonegoro 1984,p.41).

Dalam pandangan Barat individu adalah makhluk otonom yang bebas sepenuhnya untuk mengejar semua kehendaknya. Bahwa individu membentuk kehidupan bersama dengan individu lain, adalah karena dorongan rasionya guna mendapatkan keamanan serta kesejahteraan yang terjamin, bukan karena secara alamiah individu ditakdirkan hidup

bersama individu lain. Sebaliknya dalam pandangan Demokrasi Indonesia individu adalah secara alamiah bagian dari kesatuan lebih besar yakni keluarga. Oleh sebab itu pandangan demokrasi Indonesia adalah bahwa hidup merupakan kebersamaan atau kekeluargaan. Individu diakui dan diperhatikan kepentingannya untuk mengejar yang terbaik baginya, namun itu tidak lepas dari kepentingan kebersamaan atau kekeluargaan (Hazairin,1973,p.32-33).

Dalam demokrasi Barat cenderung diekspresikan dalam urusan kepentingan politik mengejar kemenangan dan kekuasaan. Oleh sebab itu adalah normal jika partai politik mengejar kekuasaan agar dengan kekuasaan itu dapat mewujudkan kepentingannya dengan sangat luas. Mereka hanya mau mengakomodasi kepentingan pihak lain jika sesuai dengan kepentingannya. Itulah bedanya dengan demokrasi Indonesia yakni demokrasi Pancasila yang dianut, yang menonjolkan sikap win-win solution demi kebersamaan (Sunardi,2002,p.11). Namun demikian pelaksanaan demokrasi Pancasila ada penekanan pelaksanaan yaitu melalui musyawarah untuk mufakat. Jika hal ini tidak tercapai tidak tertutup kemungkinan didasarkan penyelesaiannya dengan jumlah suara (voting).

Dalam demokrasi Indonesia tidak hanya faktor politik yang ditegakkan, tetapi juga faktor kesejahteraan bagi orang banyak, seperti yang dikehendaki sila ke

lima dalam Pancasila. Atau dengan kata lain, sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia yakni demokrasi kesejahteraan dan kebahagiaan inklusif demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial (Sunardi,2004,p.21).

Karena demokrasi Indonesia adalah demokrasi kesejahteraan maka wahana pelaksanaannya tidak hanya partai politik tetapi juga dilakukan oleh anggota masyarakat dengan mengutamakan perannya dalam masyarakat guna membangun kesejahteraan. Hal ini disebabkan oleh rasa tidak berminat anggota masyarakat bergulat dalam partai politik, oleh sebab itu muncul peran golongan fungsional disamping faktor daerah yang berperan dalam pelaksanaan demokrasi.

### **Matrifokalitas dan Perspektif Gender**

Matrifokalitas adalah suatu istilah yang bukan berasal dari bahasa Indonesia melainkan dari bahasa Latin, merupakan gabungan dari kata matri dan fokal. Kata matri berasal dari kata mater yang berarti ibu, sedangkan fokal berpangkal pada kata focus berarti pusat. Jadi secara harafiah matrifokal berarti "ibu sebagai pusat". Dalam hal ini ibu bukan semata mata sebagai ibu seorang anak tetapi lebih dari itu yakni kaum ibu atau wanita. Jika membicarakan manusia sebagai anggota keluarga atau masyarakat, tidak akan lepas

dari masalah fungsi dan peran kaum ibu dalam berbagai bidang.

Sejak lama para ahli antropologi banyak terlibat dalam penelitian mengenai manusia dalam sistem kekerabatan. Dari penelitian penelitian inilah kemudian muncul banyak istilah yang menyangkut peranan dan posisi wanita (kaum ibu) dalam masyarakat seperti : matriakhat, matrilineal, matrilokal, matrilateral dan lain lain.( Sudarsono dkk, 1985,p.9). Namun sistem matriakhat itu tidak pernah dapat diketemukan. Dalam pengertian matriakhat ini diidentifikasi atau diartikan kekuasaan ditangan ibu atau kaum ibu. Jadi pemahaman pemegang kekuasaan dalam paham ini adalah menyangkut bidang sosial, ekonomi, politik dan lain lain dalam lingkup terbatas yakni keluarga, maupun lingkup luas ialah masyarakat atau pemerintahan.

Matrilineal berarti menurut garis ibu, artinya keanggotaan kerabat diperhitungkan menurut garis ibu, sedang diluar itu tidak termasuk kerabat. Matriakhat berarti suatu adat dimana sesudah menikah pasangan ini harus menetap di lingkungan pihak keluarga mempelai wanita(ibid). Geertz, 1883 menyatakan bahwa keluarga utamanya wanita yang memegang otoritas karena tanggung jawab melebihi laki laki atau suami, dikenal adanya penerapan matrifokalis (p.82-83). Ada beberapa factor yang memungkinkan tumbuhnya matrifokalis dalam masyarakat ialah: (1)

Ada prinsip tentang kesetaraan antara laki laki dan perempuan; (2) Adanya prioritas hubungan antara ibu, anak dan saudara sekandung; (3) Struktur dan budaya masyarakat yang memungkinkan.

### **Kajian tentang Gender**

Pemahaman tentang gender sering disalahartikan dengan pemahaman gender adalah jenis kelamin yakni wanita. Menurut Yulia Clepes Masse, 1996 menyatakan gender berbeda dengan jenis kelamin biologis dan pengertian ini erat hubungannya dengan interpretasi biologis oleh kebudayaan (p.3). Selain itu dapat diartikan tentang peran yang bersifat Feminim dan Maskulin. Menyangkut kajian gender erat sekali dengan sejarah keluarga, sejarah wanita, sejarah sosial, sejarah ekonomi dan sejarah seksual. Di samping itu juga dapat dikaitkan dengan masalah demografi, pembagian kerja, perilaku individu dengan pranata sosial.

Dalam masyarakat tradisional, ideologi gender telah lama ada yakni dapat dilihat dalam sistem sosial dimana kaum laki laki mendapatkan hak hak istimewa sehingga kaum perempuan menjadi korban. Sistem sosial ini antara Barat dan Timur sangat berbeda karena sangat dipengaruhi oleh pranata pranata sosial. Di dunia timur (masyarakat Jawa) dalam hal ini kaum priyayi laki laki memegang dominasi terhadap kaum perempuan yang meliputi bidang sosio cultural, politik dan religius

(Sartono Kartodirdjo, 1987,p.192). Kelembagaan poligami dalam masyarakat priyayi mendorong terjadinya kaum priyayi memiliki istri lebih dari satu.

Masuknya laki laki dalam pihak wanita sesudah perkawinan, memberikan gambaran jelas tentang pembagian peran dan tugas laki laki serta perempuan atau berdasarkan jenis kelamin.Karena dalam tugas laki laki dapat memiliki alat alat produksi, ini berarti hak milik pribadi laki laki bertambah banyak, sehingga tumbuh pemahaman baru bahwa segala sesuatu diatur oleh dan untuk kaum laki laki, itu menunjukkan bahwa wanita menjadi pengabdian laki laki. (Arief Budiman, 1982,p.21). Semenjak itulah pandangan pandangan tentang perbedaan laki-laki dan perempuan menjadi semakin kuat dan tajam (Suryokusuma 1982, p.11).

Perampasan pengaruh dan kekuasaan oleh kaum laki laki hingga jaman modern ini terus berlanjut, sehingga terjadi anggapan stereotip bahwa wanita itu lemah, berkemampuan rendah, emosional dll. Hal ini sangat merugikan kaum wanita (Mansour Fakih, 1996, p.12-13), kendatipun demikian kaum wanita terus berkarya dan meningkatkan daya saing utamanya dalam dunia pendidikan. Secara adat kodrati wanita memang banyak memikul tanggung jawab antara lain mengandung, melahirkan, mengasuh anak dsb, sebaliknya laki-laki lebih banyak mendapat kesempatan dalam berkiprah. Jadi wanita justru dikelilingi oleh

pembatasan pembatasan sosial, apalagi jaman sekarang tugas tugas yang seharusnya ditangani wanita justru dilakukan laki laki seperti memasak, menjahit, merangkai bunga dsb (Suryokusuma,1981,p.10).

Dengan melihat contoh-contoh di depan nampaknya posisi subordinate dan dependent kaum wanita terhadap kaum laki-laki sulit dihapus, khususnya di kalangan masyarakat Jawa yang lekat dengan gaya hidup feodal.(Mansour Faqih,1996,p.15). Ini tergambar dalam kehidupan priyayi yang masih melekat bagi masyarakat Jawa. Sisa bentuk stratifikasi sosial menurut sistem feodal aristokrat Jawa hingga kini masih ada meskipun batas-batasnya semakin kabur. Masa lalu yang masuk golongan priyayi, priyagung, bendara, adalah berdarah biru mengalami inflasi sebab banyak yang bukan darah biru tetapi punya kedudukan tinggi juga dikenal sebagai priyayi, akibatnya sistem feodal aristokrat menjadi pudar ( Umar Kayam,1984,p.5).

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi menghasilkan terjadinya perubahan dan semangat zaman. Tampilnya wanita lapisan bawah dalam usaha peningkatan ekonomi keluarga seperti masuk dalam sektor kerajinan, sektor perdagangan mendominasi kelompok pedagang kecil termasuk warung-warung di Jawa (Stoler, 1977,p.89). Perilaku wanita – wanita kelas bawah ini kadang-kadang

penghasilannya jauh lebih tinggi daripada penghasilan suami. Mereka dapat hidup mandiri dan tidak terlalu menderita seandainya berpisah dengan suami, ini merupakan gejala baru tentang kemandirian wanita (Geertz, 1983,p.49). Jadi dalam bidang ekonomi prinsip kesetaraan cukup menonjol dan ini berpengaruh serta mengilhami para wanita golongan menengah maupun atas terutama dalam hal menentukan sikap dan mengambil tanggungjawab.

### **Dampak Modernisasi**

Salah satu ciri penting masyarakat petani di Jawa kehidupannya selalu berorientasi kepada masyarakat perkotaan yang meyangkut gaya hidup orang kota, sebagai model kemajuan zaman. Pandangan demikian makin berkembang dengan masuknya pengaruh pendidikan dan teknologi modern. Perkembangan yang dialami para wanita hampir seluruh Indonesia dalam dunia pendidikan cukup mencengangkan akibat modernisasi yang terjadi, seperti yang dikemukakan oleh Mely G.Tan (1983,p.196-199). Jika pada tahun 1961 hampir 75% wanita belum mengenyam pendidikan, namun pada 1981 jumlah wanita yang tak sempat bersekolah tinggal sepertiganya. Bahkan sampai akhir abad 20 dan permulaan abad 21 pendidikan untuk wanita ternyata sangat tinggi yakni sampai tingkat sarjana S1,S2, dan S3. Modernisasi ini juga berkembang di seluruh

dunia, sehingga muncul wanita-wanita super dalam arti menduduki posisi-posisi penting di bidang politik,sosial,ekonomi dan budaya, bahkan menjadi pemimpin pemerintahan seperti presiden,diplomat,menteri dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa wanita sebenarnya tidak kalah kemampuannya dalam berkiprah diberbagai sektor dibanding dengan kaum laki-laki.

Pada masa reoformasi/era modern superioritas laki-laki dalam keluarga semakin pudar dan menimbulkan dampak makin meluasnya sikap egaliter (equality) antara laki-laki dan perempuan baik secara structural maupun secara kultural.

### **Penutup**

Dalam sejarah perkembangan keluarga, wanita pada mulanya berkedudukan tidak berbeda dengan kedudukan laki-laki. Namun pada suatu ketika, terjadi perubahan dimana laki-laki menjadi penguasa dan mendominasi wanita. Namun dalam perjalanan sejarah pula, wanita menjadi subordinat dihadapan laki-laki. Seirama dengan perubahan dan perkembangan zaman terutama di era reformasi wanita dapat menempatkan dirinya sejajar lagi dengan kaum pria atau laki-laki, sehingga antara wanita dan laki-laki memiliki posisi sejajar atau sering disebut mitra sejajar.

Futorolog Amerika Serikat Naesbit dan istrinya Abordene yang meramalkan

pada Megatrends 2000, kaum wanita akan tampil dalam kepemimpinan bangsa, mendekati atau bahkan menjadi kenyataan. Khususnya di Indonesia, kehidupan dan perkembangan demokrasi yakni demokrasi Pancasila memberi peluang secara signifikan kaum wanita tampil sejajar dengan kaum laki-laki.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman (modernisasi) memberikan dampak mengendornya ikatan aristokrasi dan mengembang sikap egaliter serta kesetaraan, sebagai salah satu syarat munculnya gejala matrifokalitas.

#### Daftar Pustaka

- Arief Budiman.1982. *Pembagian Kerja Secara Seksual*. Jakarta. Penerbit PT. Gramedia.
- Darsiti Soeratman.1991. *Wanita Indonesia : Lampau, Kini, dan Mendatang*. Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada.
- Geertz, Hildred.1983. *Keluarga Jawa*. Edisi Indonesia. Jakarta. Grafiti Press.
- Hazairin.1973. *Demokrasi Pancasila*. Jakarta. Penerbit Tinta Mas.
- Mansour Faqih.1996. *Analisis Gender dan Transformasi sosial*. Pustaka Pelajar.
- Muhadi.2003. *Makna Renaissance dan Aufklarung Dalam Pengembangan Ilmu dan Tekhnologi*. Dalam Widyatama no.3/Tahun VII/2003.
- Masse, Yulia Crepes.1996. *Gender dan Pembangunan*. Edisi Indonesia. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Notonagara.1971. *Pancasila Secara Ilmiah Populer*. Jakarta. Pancuran Tujuh.
- Sartono Kartodirdjo.1987. *Perkembangan Peradaban Priyayi*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- Soedarsana, Djoko Sukiman, Retno Astuti.1985. *Penyunting. Wanita, Kekuasaan dan Kejahatan. Beberapa aspek kebudayaan Jawa*. Proyek Penelitian dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara (Javanologi) Direktorat Jendral Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Soenardi.2002. *Kepemimpinan Nasional yang Berbudaya*. Jakarta. LEMSTRA PDSB.
- 2004. *Memahami Pancasila Sebagai Ideologi Negara, Dasar Negara, Filosofi Bangsa dan Perikat Bangsa Indonesia*. LEMSTRA PDSB.
- Stoler, Ann "Class, Structure and Female Otonomy in Rurar Java" dalam X. Bunster B.dkk, *Women and National Development The Complexities Of Change*. Chicago. The University of Chicago Press. Tanpa tahun.
- Tan, Melly G. 1983. *Keadaan dan Hari Depan Perempuan Sebagai Sumber Daya Manusia Masyarakat Indonesia*. No.2,Th ke X. Desember 1983.
- Umar Kayam.1984. *Ditengah Himpitan Budaya, Dunia Kehidupan Pembantu Rumah Tangga Wanita*. Dalam kumpulan makalah seminar nasional wanita Indonesia. Fakta dan Citra. Yayasan Ilmu Ilmu Sosial.